

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 1, Juli - Desember 2008

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •
Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •
Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •
Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Pengantar	5-9

SAJIAN KHUSUS

Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam <i>Nurcholish Madjid</i>	13-46
Kalam Kekhalifahan Nurcholish Madjid <i>Mujiburrahman</i>	47-67
Kekhalifahan dan Tanggung Jawab Global: Menimba Inspirasi dari Mata Air Warisan Nurcholish Madjid <i>Yunasril Ali</i>	69-85

ARTIKEL

Menampilkan Agama Berwajah Ramah <i>Kautsar Azhari Noer</i>	89-114
Rekonstruksi Toleransi: Dari Toleransi sebagai <i>Modus Vivendi</i> menuju <i>Value</i> <i>Zuhairi Misrawi</i>	115-124

DAFTAR ISI

Hak-hak Minoritas, Negara dan Regulasi Agama <i>Ismatu Ropi</i>	125-138
Multikulturalisme vs <i>Nation-State</i> <i>Abdul Hadi W.M.</i>	139-160
Agama dan Kebangsaan: Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik <i>Yudi Latif</i>	161-174
Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid dan Isu-isu Gender <i>Budhy Munawar-Rachman</i>	175-188
Membuat Hidup Bermakna <i>Sri Dalai Lama Keempat-belas</i>	189-192

RESENSI BUKU

Ahl al-Kitāb: Sejarah yang Terlupakan <i>Zuhairi Misrawi</i>	195-199
---	---------

PEMBARUAN PEMIKIRAN ISLAM NURCHOLISH MADJID DAN ISU-ISU GENDER¹

Budhy Munawar-Rachman

Hampir tiga tahun lalu, pada 29 Agustus 2005, Nurcholish Madjid, atau panggilan akrabnya Cak Nur, wafat meninggalkan kita. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Banyak kenangan bersama Cak Nur. Seorang cendekiawan yang pikiran-pikirannya banyak mencerahkan orang-orang yang pernah mendengarkan perkuliahan, ceramah, wawancara, atau acara TV. Cak Nur boleh disebut sebagai pemikir besar Indonesia, karena ia mempunyai banyak sumbangan yang begitu signifikan dalam perkembangan Indonesia dewasa ini.

Untuk mengenang wafat Cak Nur, dan usia Paramadina 20 tahun, Universitas Paramadina menggelar acara “*Nurcholish Madjid Memorial Lecture*” di 15 kota-kota bekerjasama dengan universitas-universitas besar yang ada di kota-kota tersebut; dan sebuah penerbitan buku setebal 4000 halaman dalam 4 jilid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, yang telah diluncurkan di Universitas Paramadina pada 14 Februari 2007. Dengan acara dan penerbitan ini ingin dikenang pemikiran apa saja tentang keindonesiaan yang telah dikembangkan Cak Nur dalam masa lebih dari 35 tahun ia bergelut dengan usaha pemikiran dan

¹ Makalah ini pada mulanya disampaikan pada Launching Buku *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Rabu, 14 Februari 2007, di Universitas Paramadina, Jakarta.

aksi. Perhatian Cak Nur bukan hanya pada pemikiran Islam, tetapi juga pada keindonesiaan, seperti ditunjukkan dalam bukunya yang terakhir *Indonesia Kita*. Dengan penerbitan dan diskusi itu diharapkan ada inspirasi untuk memikirkan bagaimana kita harus memecahkan masalah Indonesia kontemporer.

Paham Kebangsaan

Pemikiran Cak Nur mulai menjadi isu nasional ketika ia menegaskan pentingnya sekularisasi politik sebagai paham kebangsaan. Sekularisasi berarti ada pemisahan antara wilayah agama dan wilayah politik. Dalam bahasa Cak Nur, dalam kaitan dengan politik Islam: “Islam, *Yes*, Partai Islam, *No*!” Slogan ini sebenarnya dalam tanda tanya, tetapi pemikiran Cak Nur sendiri mengafirmasikan pentingnya sekularisasi politik. Menurut Cak Nur, sekularisasi politik adalah solusi untuk mengembangkan paham kebangsaan di tengah pergulatan ideologis keagamaan dan politik.

Ide sekularisasi Cak Nur sangat kontroversial pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Cak Nur sendiri menyayangkan kontroversi itu, hanya karena stigmanya istilah sekularisasi. Belakangan ia lebih senang menggunakan istilah “desakralisasi politik” atau demitologisasi—seperti dipergunakan oleh sosiolog Amerika Serikat, Robert N. Bellah. Dan konsep ini telah dielaborasi Cak Nur secara teologis, berkaitan dengan pemahaman esensial mengenai tawhid (monoteisme).

Lontaran pemikiran Cak Nur era awal 1970-an ini memberikan pada kita renungan yang sangat penting tentang hubungan agama dan negara, yang sekarang muncul kembali di era otonomi daerah melalui munculnya banyak peraturan daerah yang bersifat keagamaan. Campur-aduk kepentingan agama dan negara, menjadikan agama ikut campur dalam urusan negara, dan sebaliknya negara juga ikut campur dalam urusan agama. “Perselingkuhan” ini—begitu istilah yang sekarang sering dipakai—mengakibatkan dampak pada ruang kebebasan beragama yang semakin sempit, dan terasa sesak di

Indonesia, seperti terlihat dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama belakangan ini. Tahun 2005-2006 boleh dikatakan sebagai tahun paling mundur dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Keadaan ini menyuburkan apa yang Cak Nur sangat khawatir sejak lama, yaitu menguatnya fenomena radikalisme dalam Islam di Indonesia, yang akan merusak wajah Islam moderat dalam kehidupan masyarakat.

Cak Nur dengan pikiran yang jernih menjelaskan hubungan tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberikan dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemasalahatan bersama. Tiga nilai etika politik yang sangat kompatibel dengan agama yang selalu Cak Nur elaborasi adalah: keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Karena sifat negara seharusnya netral-agama, maka bahasa-bahasa etika politik itu bersifat umum. Di sini, Cak Nur menegaskan Pancasila sebagai *common platform* dari semua suku, ras, golongan, dan khususnya agama-agama yang ada di Indonesia. Mengelaborasi filosofi tentang Pancasila ini termasuk hal yang menjadi *concern* Cak Nur bertahun-tahun. Walaupun seringkali dalam mengelaborasi Pancasila ini, Cak Nur mengaitkan dengan al-Qur'an, misalnya, tetapi pikiran-pikirannya bisa diamini oleh siapapun, tidak tergantung pada agamanya apa. Inilah sisi universal pemikiran Cak Nur. Ia memang seorang ahli Islam, tetapi begitu universal dan kosmopolit keislamannya itu, pikiran-pikirannya mempunyai pengaruh pada semua kalangan. Jenis pemikiran Islam yang dalam istilah Cak Nur *al-hanafiyyah al-samhah*—kecenderungan beragama yang terbuka dan penuh kelapangan—inilah yang terus ditegaskan sebelum beliau sakit. Ini pula kesan kita kalau membaca bukunya *Indonesia Kita*, yang merupakan manifesto Cak Nur untuk reformasi.

Pancasila dan Demokrasi Indonesia

Dalam buku *Indonesia Kita* ini terelaborasi secara padat pikiran-pikiran politiknya selama 30 tahun, terutama, di samping sepuluh

agenda reformasi yang menurut Cak Nur sangat mendesak. Cak Nur menegaskan demokrasi sebagai cara, bukan tujuan. Dalam pikiran Cak Nur, suatu tujuan yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti istilah filsuf eksistensialis yang sering dikutip Cak Nur, Albert Camus menegaskan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan. Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah menurut Cak Nur salah satu sendi pandangan hidup demokratis. “Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus bersesuaian dengan tujuan”. Ketentuan inilah, menurut Cak Nur, jika dipraktikkan, yang akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis”. Cak Nur sering mengutip syair Ferdinand La Salle, “Janganlah kami ditunjukkan hanya tujuan, tanpa cara/Sebab tujuan dan cara di dunia ini sedemikian terjalin (erat)/Mengubah salah satu akan berarti mengubah satunya lagi juga/Setiap cara yang berbeda akan menampakkan tujuan yang lain”.

Begitulah, dalam mengelaborasi Pancasila, menurut Cak Nur, prinsip demokrasi sebagai cara itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila dalam pikiran Cak Nur dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Dan Cak Nur menegaskan, kita telah diajari oleh para pendiri bangsa ini untuk memandang seluruh sila itu sebagai kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Maka berarti bahwa antara “cara” dan “tujuan” pun tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain.

Maka sebenarnya pikiran kebangsaan Cak Nur, yang pernah menjadi kontroversi besar di kalangan umat Islam pada era 1970-an, merupakan suatu filosofi yang dipikirkan Cak Nur untuk membangun fondasi keindonesiaan, seperti Pancasila—termasuk di dalamnya menempatkan peranan agama dalam politik. Cak Nur selalu menegaskan bahwa peranan agama dalam politik ada pada level moralitas, bukan politik. Khusus soal moralitas inilah Cak Nur sangat prihatin pada keadaan masyarakat Indonesia, dan

lebih khusus pada umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia. Ada hukum yang Cak Nur kemukakan—dalam bahasa Latin—“*corruptio optimi pessima*” (“kejahatan oleh orang terbaik adalah kejahatan yang terburuk,” “*corruption by the best is the worst*”), maka pelanggaran prinsip keadilan dan keseimbangan—yang merupakan salah satu pikiran etika politik yang selalu ditekankan Cak Nur—oleh kaum Muslim akan mendatangkan malapetaka berlipat ganda. Hukum yang sama sebenarnya berlaku atas para penganut setiap agama, sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang sama.

Hal lain mengenai kebangsaan yang sangat memprihatinkan Cak Nur adalah keadaan negara Indonesia sebagai “negara lunak” (*soft state*) istilah yang sudah sejak era 80-an dipelajari Cak Nur lewat pikiran Karl Gunnar Myrdal (1898-1987). Menurut Cak Nur, Indonesia adalah “negara lunak”, yaitu negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Cak Nur sering menegaskan mengenai penyakit sosial-politik bangsa Indonesia yang disebutnya penyakit “kelembekan” (*leniency*), “sikap serba memudahkan” (*easy going*), sehingga tidak memiliki kepekaan cukup terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi. Dan jenis korupsi yang paling Cak Nur prihatinkan dan telah berjalin-kelindan dalam budaya orang Indonesia adalah korupsi dalam bentuk *conflict of interest*.

Cak Nur sering disebut “Guru Bangsa” karena ia terus menerus tak pernah berhenti, dan dengan penuh kesabaran, selalu mengingatkan kita tentang pentingnya “menegakkan standar moral bangsa”. Dalam analisis Cak Nur, lemahnya standar moral inilah yang telah menyebabkan kita sekarang mengalami krisis multidimensional, tidak semata-mata krisis finansial-moneter seperti kebanyakan negara tetangga kita. Akibatnya, krisis terus berlanjut, sementara negara-negara tetangga telah berhasil mengatasinya. Cak Nur selalu mengutip Louis Kraar, seorang pengamat negara-negara industri baru di Asia Timur, yang pada tahun 1988 sudah meramalkan bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi halaman belakang (*back yard*) Asia Timur, ditinggalkan oleh negara-negara tetangga sudah

berkembang menjadi negara-negara maju. Menurut Cak Nur, penyebabnya adalah “etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat” (*lousy work ethics and serious corruption*).” Sumber malapetaka ini, dalam analisis politik Cak Nur, terjadi tidak hanya ada dalam bidang finansial-moneter semata, melainkan dalam pengelolaan yang lemah (*weak governance*) dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.

Pemikir Islam

Cak Nur adalah seorang pemikir Muslim. Ia sering dijuluki sebagai cendekiawan Muslim paling terkemuka di Indonesia dewasa ini. Sebenarnya pikiran-pikirannya mengenai keislaman terkait erat dengan dua dimensi kehidupan umat Islam Indonesia, yaitu keindonesiaan dan sekaligus kemodernan. Merajut tiga segi umat Islam inilah (keislaman-kemodernan-keindonesiaan) membawa Cak Nur pada upaya pemikiran peradaban Indonesia. Peradaban memang kata kunci yang sangat sering dipakainya. Ia sangat merindukan terwujudnya peradaban Indonesia. Karena itu Cak Nur mempelajari banyak khazanah filsafat modern, sekaligus tradisi lama yang masih relevan untuk diaktualkan kembali. Kalau Cak Nur sering membicarakan peradaban Islam sebagai “peminjam yang baik”—dalam contoh sejarah sains yang sering dicontohkannya—, umat Islam adalah yang pertama sekali menginternasionalkan ilmu pengetahuan. Sebelum Islam, ilmu pengetahuan bersifat lokal dan nasional saja; ada ilmu Yunani, ilmu Persi, ilmu Cina, yang satu sama lain tidak mau saling belajar. Barulah pada zaman Islam semuanya disatukan. Maka begitulah pandangan pribadi Cak Nur.

Dalam khazanah pemikirannya, Cak Nur adalah seorang “peminjam yang baik”. Ia tidak segan-segan mengambil khazanah dari macam-macam tradisi: Timur, Barat, Islam, Kristen, dan agama-agama lain. Semua khazanah terbaik umat manusia diolahnya sehingga menjadi sebuah pemikiran hibrida yang sangat kaya nuansa dan inspiratif dalam memecahkan masalah keislaman dalam konteks keindonesiaan ini, terutama menghadapi berbagai isu modern dan global.

Salah satu masalah keislaman yang paling kuat Cak Nur kemukakan adalah masalah pluralisme. Sebuah pemikiran yang sudah sejak lama Cak Nur menyadari pentingnya terwujud dalam realitas masyarakat Indonesia, justru karena pluralisme adalah salah satu sendi yang sangat menentukan keberhasilan bangsa Indonesia membangun peradabannya yang adil, terbuka, dan demokratis. Tanpa pluralisme, tak mungkin ada demokrasi. Karena itu Cak Nur menyiapkan fondasi demokrasi ini dengan dasar-dasar normatif-teologis terlebih dahulu. Dari Cak Nurlah dikenal luas istilah—yang pada mulanya berasal dari al-Qur'an—*kalimah sawā'* (*common platform*, “tempat pijakan bersama”, “titik-temu”) agama-agama, bahwa semua agama bertemu pada satu *ultimate concern* yang sama pada tingkat transenden (*the transcendent unity of religions*, istilah filsuf Fritjof Schuon yang dikembangkan lebih membumi oleh Cak Nur), dan keprihatinan etis, pada tingkat imanen. Agama-agama di Indonesia menurut Cak Nur, berperan penting dan menentukan perkembangan Indonesia modern.

Cak Nur mempersiapkan dasar teologis umat Islam untuk bisa menerima pluralisme, agar dengan demikian umat Islam mau berperan aktif dalam mengembangkan pemikiran keindonesiaan tanpa halangan keagamaan apa pun.. Cak Nur sangat sadar umat Islam—akibat perjuangan melawan kolonialisme yang panjang—mengidap mentalitas *fight against* (perjuangan melawan), yang memang sangat relevan di masa perjuangan, tetapi di masa reformasi sekarang ini, umat Islam harus pro-aktif mengembangkan pemikiran dan aksi yang sifatnya *fight for* (perjuangan untuk). Sepuluh platform reformasi Cak Nur dalam *Indonesia Kita* adalah agenda yang jelas merupakan keprihatinan etis, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga semua bangsa Indonesia.

Pemikir Besar Indonesia

Dengan demikian Cak Nur bukan hanya seorang pemikir Muslim. Dia adalah pemikir besar Indonesia. Tepat sekali kalau padanya diberikan predikat “Guru Bangsa”. Pikiran-pikirannya bisa

dibandingkan dengan para Bapak Bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Hadji Agus Salim, Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, dan sebagainya. Sebagai pemikir, Cak Nur selalu membayangkan Indonesia di masa depan. Sebuah ilustrasi yang menarik pernah penulis dengar dari Cak Nur: Indonesia sebenarnya didesain dengan model budaya pesisir. Tetapi, seperti pasir di pantai, orang-orang pesisir itu agak *fragmented* (terpecah). Ini merupakan konsekuensi dari suatu mobilitas masyarakatnya yang sangat tinggi. Maka, mereka tidak memiliki tradisi dalam menjalankan kekuasaan yang kuat. Persis di sinilah peranan orang Jawa sebagai suku yang paling kuat tradisinya dalam menjalankan pemerintahan dalam skala besar. Kerajaan Majapahit adalah warisannya yang terbesar. Akibatnya, orang Jawa mempunyai sifat imperialistik. Buktinya ada istilah “Jawa-Luar Jawa”.

Dalam pembentukan Indonesia, kata Cak Nur, orang Jawa mengambil peranan yang besar sekali. Meminjam istilah dari komputer, ada aspek perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) bagi Indonesia. Perangkat lunak Indonesia adalah Sumatera dengan dukungan bahasa Melayu. Ide-ide modern seperti egalitarianisme, keadilan, demokrasi, keterbukaan, dan seterusnya, telah termuat inheren dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan perangkat kerasnya adalah aspek kejawaan, yaitu birokrasi dan militer. Menurut Cak Nur, tidak ada yang lebih berpengalaman dari orang Jawa untuk menjalankan birokrasi dan militer, yang diibaratkan sebagai aspek *hardware*-nya.

Sampai sekarang pembentukan Indonesia masih berlangsung dalam tarik-tambang keduanya. Sama dengan pendulum jam: kadang-kadang berayun ke kanan, kadang-kadang berayun ke kiri; ke model Sumatera, atau ke model Jawa. Pendulum itu masih terus bergerak. Bahkan Cak Nur sering *guyon*, pendulum itu nanti akan mengalami keseimbangan dan ketemunya di Pekalongan—satu daerah dengan pola budaya pantai (pesisir) tetapi Jawa, atau Jawa tetapi di pantai. Indonesia nanti seperti Pekalongan, di mana etosnya egalitarian, kosmopolit, terbuka, mobilitasnya tinggi, dan seterusnya. Tetapi di samping itu juga ada substansiasi atau sofistikasi, tidak simplistik,

dan mempunyai kebudayaan yang tinggi (seperti kebudayaan Jawa). Itulah mimpi Cak Nur mengenai peradaban Indonesia.

Cak Nur dan Isu-isu Gender

Di kalangan para aktivis isu perempuan, sering muncul pertanyaan, apakah Nurcholish Madjid (Cak Nur) mempunyai concern pada isu-isu gender. Tidak ada persoalan Islam kontemporer yang tidak digeluti oleh Cak Nur, selama ia dalam hampir 20 tahun menyemai pemikiran Islam di Paramadina. Sebutlah pemikirannya mengenai isu syariat Islam yang sekarang ramai dibicarakan, atau mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, apalagi mengenai pluralisme, semua isu itu dipikirkan dan dibicarakan secara mendalam, dan Cak Nur seringkali menjadi *cover story* di koran maupun majalah untuk isu tersebut. Tapi isu gender? Tidak pernah sekali pun. Apakah itu berarti bagi Cak Nur isu gender bukanlah isu? Artinya isu gender itu tidak penting, atau tidak masalah di situ.

Kalau kita melihat karangan-karangan Cak Nur dalam sekitar 20-an bukunya yang telah terbit, isu perempuan paling hanya ada dua artikel. Ini berarti isu perempuan atau gender tidak menjadi isu utama yang Cak Nur merasa perlu mengadvokasikannya sungguh-sungguh. Di antara semua isu yang digeluti Cak Nur, isu pluralisme—atau yang diistilahkannya sendiri, “Islam inklusif”, adalah isu yang terus menerus ia perjuangkan. Kelihatannya Sejak awal 1990-an ia sudah merasa bahwa isu ini akan menjadi isu kontroversial yang besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Dan ternyata memang benar, Cak Nur sendiri, di akhir hayatnya sangat sedih dengan perkembangan pluralisme yang mundur. Ia merasa bahwa pekerjaannya selama 35 tahun—sejak ia menggulirkan isu sekularisasi pada 1970—seperti kata pepatah Inggris ini *pulling the carpet under the table*. Ia merasa sudah menyiapkan suatu hidangan “Islam inklusif”—atau Islam yang *rahmah li al-‘ālamīn*, tetapi sekarang dengan adanya Fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ia merasa seperti ada

gerakan sistematis yang menarik karpet di bawah meja yang sudah terhidang pluralisme Islam, yang menjadikan hidangan itu sekarang berantakan. Itulah kesedihan di akhir hayat Cak Nur.

Kembali ke isu gender, memang secara khusus Cak Nur tidak memberi perhatian pada isu ini. Ini memang aneh. Padahal, dalam pemikiran Islam kontemporer, ada dua isu yang sangat kontroversial di dunia Islam sekarang ini yaitu pluralisme dan gender. Untuk isu yang pertama, hampir seluruh usia karir intelektual Cak Nur dihabiskan untuk mengembangkan paham pluralisme (dalam arti yang seluas-luasnya), tapi sangat sedikit pehatiannya pada isu gender. Kelihatannya Cak Nur *taken for granted* bahwa dengan ide-idenya mengenai liberalisasi itu, sudah termasuk di dalamnya pembelaan terhadap kesetaraan gender, antara perempuan dan laki-laki. Dan dalam hal kesetaraan gender ini Cak Nur memang mengamini sepenuhnya, seperti pada umumnya pemikir modernis. Tapi yang mengherankan Cak Nur tidak pernah terlibat mendekonstruksi banyak ajaran Islam yang tidak adil secara gender, dan telah mendiskriminasikan perempuan. Hal ini sangat mencolok terlihat, ketika ia tidak memasukkan isu gender dalam 10 platform reformasinya yang terkenal, yang kemudian terbit dalam bukunya *Indonesia Kita*. Setelah dikritik, ia memasukkan isu perempuan dalam sub pendidikan, sebagai isu pendidikan perempuan, bukan sebagai salah satu platform yang terpisah, yang menegaskan perlunya misalnya *affirmative action* untuk keterlibatan perempuan dalam semua segi kehidupan ekonomi, sosial, politik, sampai agama.

Memang timbul tanda tanya, mengapa Cak Nur tidak memasukkan isu gender dalam agenda pembaruannya. Padahal sudah banyak buku yang membahas mengenai masalah ini, katakan saja, pemikir-pemikir seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, adalah nama-nama yang sudah dikenal dalam isu gender, sudah sejak awal 1990-an. Mungkin Cak Nur mau berspesialisasi hanya dalam bidang pemikiran falsafah dan kalam yang menjadi keahliannya. Tapi ternyata Cak Nur seorang generalis dalam pemikiran Islam. Dari studi yang saya buat untuk penulisan dan penyuntingan buku *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (4 jilid besar), hampir semua isu

Islam ada dalam pemikiran Cak Nur. Jadi bagaimana penjelasannya? Ini memang teka-teki atau misteri yang meliputi pemikiran Cak Nur, yang kita hanya bisa berspekulasi. Spekulasi saya adalah, Cak Nur memang tidak menganggap gender sebagai isu Islam yang penting. Atau kalau ia memang tahu bahwa ini isu yang sangat penting, ia tidak mau masuk dalam kontroversi yang barangkali akan dianggapnya tidak produktif. Atau kalau mengikuti bahasa Paulo Freire, Cak Nur dalam soal isu gender ini “berkesadaran naif”—maksudnya tidak melihat permasalahan besar dalam penafsiran Islam mengenai perempuan selama ini, yang perlu diperbarui.

Tapi lepas dari soal itu, Cak Nur ternyata juga sangat liberal dalam beberapa isu gender yang sekarang banyak dibicarakan para kalangan feminis Muslim. Dua hal yang bisa menjadi catatan di sini: Pertama adalah soal jilbab. Dalam suatu konferensi internasional di LIPI Jakarta, Cak Nur mengemukakan bahwa jilbab itu sebenarnya adalah budaya Arab, dan tidak ada kewajiban bagi kaum Muslimah untuk menggunakan jilbab. Di sini Cak Nur sangat sadar dengan konteks budaya dari pakaian.

Dan yang kedua, yang lebih kontroversial, Cak Nur tidak keberatan dengan pernikahan antaragama (ini adalah kelanjutan dari perhatian Cak Nur pada pluralisme), bahkan dengan pernikahan antara perempuan Muslimah dan laki-laki non-Muslim, yang diharamkan oleh para ulama pada umumnya. Walaupun Cak Nur tidak pernah memberi argumen mengenai soal ini, tetapi ia tidak pernah berkeberatan sedikit pun atas penulisan buku *Fikih Lintas Agama*—yang kemudian menjadi buku pemikiran Islam paling kontroversial di tahun 2004—dan penerapannya dalam pelayanan pernikahan antaragama yang dilakukan di Paramadina.

Dari dua contoh ini saja membuktikan bahwa sebenarnya Cak Nur cukup peduli dengan suatu isu gender, tetapi ia kelihatannya menyerahkan pada yang lebih muda untuk mengembangkannya lebih lanjut, terutama bagaimana argumen untuk isu perempuan yang lebih adil secara gender itu berdasarkan *nash*. Misalnya terhadap pemikiran Nasaruddin Umar, mantan pengurus Paramadina, yang disertasinya diterbitkan di Paramadina, ia tidak berkeberatan sama sekali. Juga ia

tidak keberatan dengan kajian-kajian mengenai feminisme Islam yang pernah dilakukan di sana secara intensif.

Akhirnya, satu hal yang menarik dari Cak Nur, walaupun ia tidak banyak mewariskan tulisan mengenai isu gender, adalah bahwa pemikirannya mengenai Islam jelas sangat berguna dalam memecahkan berbagai masalah dalam konteks isu gender. Dari Cak Nur kita mendapatkan semangat bahwa pada dasarnya agama itu adalah kemanusiaan. Visi keagamaan baru harus sejalan dengan perkembangan kesadaran terbaru mengenai kemanusiaan. Apa yang merupakan perkembangan kesadaran kemanusiaan terakhir adalah bahwa Islam begitu lentur bisa mengikuti perubahan-perubahan kesadaran zaman. Ini makna sesungguhnya idiom pesantren yang sering dikutip Cak Nur: *Al-Islām shālih li kulli zamān wa makān*—bahwa Islam itu universal. Cak Nur meyakini perlunya semacam proses berevolusi dalam kesadaran keberagamaan kita. Oleh karena itu kalau ada isu feminisme, dan disadari bahwa feminisme adalah sebuah analisis yang membantu kita mengerti tentang realitas gender, dan bagaimana telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, di mana ternyata kita sekarang tahu bahwa penafsiran agama telah ikut melanggengkan proses diskriminasi tersebut, maka tugas kitalah untuk melakukan pembaruan atas pengertian kita mengenai agama. Semangat Cak Nur ini, dan keberaniannya melakukan pembaruan pemikiran Islam, menjadikan kita tertantang untuk melakukan pembaruan dalam bidang yang sekarang sangat relevan, yaitu gender.

Kesimpulannya, walaupun Cak Nur tidak banyak bicara mengenai isu gender, tetapi spiritnya untuk pembaruan pemikiran Islam selalu menyertai para aktivis gender, dan para feminis, laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, walaupun Cak Nur tidak mempunyai perhatian khusus mengenai isu perempuan, tetapi ia sangat concern pada ajaran yang genuine Islam mengenai perempuan, dengan visi kesetaraan gender. Misalnya, ia selalu mengingatkan kita dalam menafsirkan teks-teks tentang perempuan dalam Islam yang sering disebut oleh kaum feminis sebagai yang bersifat “misoginis”. Cak Nur selalu menegaskan pentingnya kita bersikap jujur terhadap teks-teks suci itu. Maksudnya, ia mengingatkan kita, bahwa kita

tidak mungkin memahami teks-teks tersebut sama sekali lepas dari konteks sejarah diturunkannya atau kejadiannya (*asbāb al-nuzūl* [sebab-sebab turunya ayat-ayat al-Quran tertentu] dan *asbāb al-wurūd* [sebab-sebab terjadinya tindakan, ucapan atau sikap Nabi tertentu]) sehingga, mengikuti pandangan ulama klasik menjadi sangat penting diperhatikan.

Menurut Cak Nur, mengikuti jalan pikiran itu, banyak perempuan Muslimah yang berusaha mengkaji kembali pandangan Islam tentang perempuan, dan meneliti mana yang syariat dan mana pula yang adat (Kita bisa tulis di sini tokoh-tokoh feminis yang terkenal di Indonesia seperti Riffat Hassan, Fatima Mernisi, dan Amina Wadud, juga tokoh di Indonesia seperti Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Lies Marcoes telah melakukan pendekatan hermeneutika kesejarahan itu). Menurut Cak Nur, pertentangan atau perbedaan pandangan antara adat dan ajaran suci (yang notabene, sepanjang mengenai teks-teks sucinya dalam Kitab dan Sunnah, juga datang dalam konteks ruang dan waktu tertentu di zaman Nabi) terjadi terutama karena adanya semacam kegagalan untuk memahami ide umum teks-teks suci itu dan terpaku pada ide-ide *ad hoc*-nya. Ini bukanlah suatu jenis interpretasi metaforis, sebab makna lahiriah sebuah ungkapan kebahasaan teks tetap dipegang. Itu sebabnya dalam usaha memahami pesan dasar sebuah teks suci perlu sungguh-sungguh diperhatikan benar bahan kesejarahan yang terkait, guna menangkap apa yang sering disebut Cak Nur, *ḥikmat al-tasyrīʿ* (kearifan dasar atau “falsafah” penetapan syariat), yang juga disebut *manāth al-ḥukm* atau *ʿillat al-ḥukm* (alasan penetapan hukum, atau ratio legis).

Dengan metode pendekatan itu Cak Nur sampai pada kesimpulan asas bahwa seluruh ide tentang perempuan dalam al-Quran dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat perempuan dan mempersamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki melalui proses pembebasannya dari kungkungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliyah. Misalnya beberapa masalah yang pernah digali Cak Nur, seperti (1) Masalah *waʿd al-banāt* (pembunuhan bayi perempuan). (2) Masalah *al-ʿadll*, yaitu adat menghalangi atau melarang perempuan dari nikah setelah talak, sengaja untuk

mempersulit hidupnya. (3) Masalah *al-qisāmah*, suatu kebiasaan buruk yang cukup aneh di kalangan orang Arab Jahiliyah berupa larangan kepada kaum perempuan dalam keadaan tertentu untuk meminum susu binatang seperti kambing, onta, dan lain-lain, sementara kaum laki-laki diperbolehkan. (4) Masalah *al-zhibhār*, suatu kebiasaan buruk yang juga cukup aneh pada orang Arab Jahiliyah berupa pernyataan seorang lelaki kepada isterinya bahwa isterinya baginya seperti punggung (zhahir) ibunya, sehingga terlarang bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-isteri, sebagaimana terlarangnya seseorang untuk berbuat hal serupa itu kepada ibunya sendiri. (5) Masalah *al-ilā'*, yaitu kebiasaan sumpah seorang suami untuk tidak bergaul dengan isterinya, sebagai hukuman kepadanya.

Masalah-masalah adat Arab yang sangat ditentang keras oleh al-Qur'an ini merupakan sebagian kecil contoh yang paling nyata dari proses pembebasan perempuan dari kungkungan adat yang merampas dan atau membatasi kebebasannya. Dari proses pembebasan ini, perempuan kemudian diangkat derajatnya menjadi sama dengan laki-laki, baik dalam harkat dan martabat maupun dalam hak dan kewajiban. Penegasan tentang kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki itu dapat dibaca dalam berbagai surat dan ayat, antara lain surat 49: 13, 53: 45-46, 4: 1, dan 7: 190. Nabi saw, seperti dikutip Cak Nur, pernah membuat pernyataan kutukan kepada praktek mengingkari persamaan laki-laki dan perempuan itu sebagai praktek Jahiliyah.

Jadi walaupun Cak Nur bukan seorang "feminis laki-laki", ia harus kita kenang sebagai seorang yang memang sungguh-sungguh membela paham kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki. ❖

Budhy Munawar-Rachman adalah kandidat Doktor dalam bidang filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.